

PERAN HAJI RAIS BIN HAJI ABDURRAHMAN DALAM MEMBANGUN KESADARAN NASIONALISME RAKYAT MELALUI PERS (1923–1942)

Putri Rahmadini¹, Karel Juniardi², Arif Januardi³

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Program Studi Pendidikan Sejarah

Universitas PGRI Pontianak

e-mail: rahmadiniputri47@gmail.com¹, kareljuniardi82@gmail.com²
arifjanuardi90@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman dalam membangun dan menumbuhkan kesadaran nasionalisme rakyat Kalimantan Barat melalui media pers pada kurun waktu 1923 hingga 1942. Fokus penelitian diarahkan pada keterlibatan Haji Rais dalam pengelolaan dan penulisan surat kabar *Halilintar* (1923–1924), *Borneo Barat* (1938), serta majalah *Kesedaran* (1939) yang menjadi sarana penyebaran gagasan kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Haji Rais bin Haji Abdurrahman memanfaatkan media pers sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan terhadap kolonialisme Belanda dengan menyebarkan ide-ide nasionalisme, kesadaran politik, dan kemandirian ekonomi rakyat. Tulisan-tulisannya juga berperan dalam memperkuat aktivitas organisasi pergerakan lokal seperti Sarekat Rakyat, Partai Indonesia Raya (Parindra), dan Persatuan Anak Borneo (PAB). Kajian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan historiografi lokal serta menegaskan peran strategis media pers sebagai instrumen perjuangan ideologis dan pembentukan kesadaran nasional.

Kata Kunci: : Haji Rais bin Haji Abdurrahman, Nasionalisme, Pers, Kalimantan Barat, Kolonialisme

Abstract

This study aims to uncover the role of Haji Rais bin Haji Abdurrahman in building and fostering nationalist awareness among the people of West Kalimantan through the press between 1923 and 1942. The focus of the study is directed at Haji Rais's involvement in managing and writing the Halilintar newspaper (1923–1924), West Borneo (1938), and Kesedaran magazine (1939), which served as a means of disseminating nationalist ideas. This study uses a historical method that includes four stages: heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results show that Haji Rais bin Haji Abdurrahman utilized the press as a form of non-violent resistance against Dutch colonialism by spreading the ideas of nationalism, political awareness, and economic independence of the people. His writings also played a role in strengthening the activities of local movement organizations such as the People's Union, the Great Indonesia Party (Parindra), and the Children of Borneo Association (PAB). This study makes an important contribution to the development of local historiography and emphasizes the strategic role of the press as an instrument of ideological struggle and the formation of national consciousness.

Keywords: *Haji Rais bin Haji Abdurrahman, Nationalism, Press, West Kalimantan, Colonialism*

PENDAHULUAN

Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui jalur fisik atau militer, tetapi juga melalui jalur intelektual, seperti media massa. Pers memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan menanamkan semangat nasionalisme kepada masyarakat. Di Kalimantan Barat, peran tokoh lokal seperti Haji Rais bin Haji Abdurrahman sangat signifikan dalam menggerakkan kesadaran kebangsaan melalui surat kabar lokal. Sayangnya, dalam historiografi nasional, peran tokoh-tokoh lokal seperti Haji Rais masih belum banyak mendapat perhatian.

Pers atau surat kabar merupakan salah satu pilar utama dalam menyampaikan informasi, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Sejak awal kemunculannya, pers telah menjadi alat perjuangan rakyat dalam menyuarakan kebebasan berekspresi. Perkembangan definisi dan fungsi pers pun terus berubah mengikuti dinamika zaman, teknologi, dan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks sejarah Indonesia, pers memainkan peran strategis, tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai medium perjuangan menuju kemerdekaan.

Sejarah pers Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa itu sendiri. Pers nasional lahir bersamaan dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan pada awal abad ke-20, khususnya sejak

berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Pada masa kolonial Belanda, terdapat dua arus utama dalam dunia pers: pers yang dikendalikan oleh penguasa kolonial dan pers lokal yang lahir dari semangat perjuangan rakyat. Pers lokal ini diterbitkan sebagai sarana untuk memacu semangat nasionalisme dan melawan penjajahan dengan strategi intelektual.

Salah satu bentuk pers lokal yang berkembang di luar Jawa adalah di Kalimantan Barat. Media cetak di wilayah ini berkembang dalam dua fase. Fase pertama (1919–1927) ditandai oleh kritik tajam terhadap pemerintah kolonial dan penggunaan gaya penulisan yang radikal. Namun, akibat penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh pergerakan, seperti pembuangan ke Boven Digoel pada tahun 1927, maka fase kedua (1927–1941) mengalami pergeseran strategi. Perjuangan dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih halus dan intelektual melalui surat kabar yang tetap memuat pesan-pesan nasionalisme secara tersirat.

Salah satu surat kabar yang penting dalam konteks ini adalah *Halilintar* (1923–1924), yang dikelola oleh Haji Rais bin Haji Abdurrahman. Surat kabar ini berhaluan radikal dan banyak memuat kritik terhadap sistem kolonial dan feodalisme, serta memperjuangkan nasib buruh dan kaum tertindas. Selain itu, ada juga surat kabar *Borneo Barat* (1938) dan *Kesedaran* (1939) yang turut di kelola oleh Haji Rais bin Haji

Abdurrahman berhaluan netral. Haji Rais juga tercatat sebagai anggota dalam sebuah organisasi atau perkumpulan. Tercatat ia pernah mengikuti beberapa organisasi seperti Sarekat Islam, Sarekat Rakyat, Parindra dan organisasi Persatuan Anak Borneo (PAB).

penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam kajian sejarah pers di Kalimantan Barat dengan fokus pada peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman sebagai tokoh lokal yang menggunakan pers sebagai instrumen perjuangan. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tulisan-tulisan Haji Rais dalam surat kabar yang ia kelola, serta menelaah dampaknya terhadap kesadaran nasionalisme rakyat Kalimantan Barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian sejarah pers dan nasionalisme Indonesia dari perspektif lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji peristiwa masa lampau dan menelusuri peran tokoh dalam dinamika sosial-politik tertentu.

Menurut Daliman (2018:27), metode sejarah merupakan serangkaian prosedur sistematis dalam meneliti dan menulis sejarah

berdasarkan kaidah ilmiah. Sementara itu, Garraghan (dalam Herlina, 2020:1) menyatakan bahwa metode sejarah merupakan seperangkat prinsip untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan sumber sejarah secara kritis dan analitis.

Tahapan heuristik atau pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik. Sumber primer dalam penelitian ini berupa surat kabar yang ditulis langsung oleh Haji Rais bin Haji Abdurrahman antara tahun 1923 hingga 1939. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, arsip, foto dokumenter, serta wawancara dengan narasumber kunci.

Wawancara dilakukan dengan sejumlah tokoh, di antaranya:

1. Mulyani, cucu Haji Rais, yang memberikan informasi mengenai riwayat hidup serta dokumen pribadi almarhum;
2. Lisyawati Nurcahyani, peneliti Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII dan penulis buku yang membahas Haji Rais;
3. Mohammad Rikaz Prabowo, dosen sejarah Universitas Tanjungpura, yang memberikan analisis akademik dan arsip surat kabar;
4. Ahmad Sofian DZ, penulis, Direktur Eksekutif LPS AIR yang memberikan konteks historis mengenai kolonialisme dan perkembangan pers di Kalimantan Barat.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Kehidupan Haji Rais bin Haji Abdurrahman

A. Latar Belakang Kehidupan Haji Rais bin Haji Abdurrahman

1. Masa Kecil

Haji Rais bin Haji Abdurrahman merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional khususnya daerah Kalimantan Barat. Beliau kurang mendapat sorotan dalam historiografi Indonesia, namun peranannya dalam membangun nasionalisme rakyat melalui media pers sangat memiliki peranan yang signifikan.

Haji Rais bin Haji Abdurrahman lahir pada tahun 1904 di Kampung Parit Mayor, Pontianak, Kalimantan Barat. Ia merupakan anak sulung dari lima bersaudara, berasal dari keluarga pedagang dengan latar ekonomi menengah. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan religius dan menempuh pendidikan di sekolah Belanda hingga kelas VII lalu ia memutuskan untuk merantau dan menambah ilmu di luar daerah, sebagai bentuk tekad untuk memperbaiki nasib dan memperluas wawasan (Listiana et al., 2019:51).

Ia merupakan anak tertua dari 5 orang bersaudara yang lahir dari perut seorang ibu bernama Kesum dan ayahnya bernama Haji Abdurrahman. Adik adiknya bernama Japri, Asiah, Saimah dan yang terakhir adalah Salmah

(Keluarga Haji Rais, wawancara Mei 2025).

Lingkungan sosial tempat tinggalnya yang kuat nilai agama dan semangat perlawanan turut membentuk karakter Haji Rais. Ia menyaksikan secara langsung ketimpangan dan kekejaman pemerintah kolonial terhadap rakyat Kalimantan Barat, yang kemudian melahirkan kesadaran nasionalisme dalam dirinya.

2. Masa Pembuangan

Keterlibatan Haji Rais dalam Sarekat Rakyat dan dunia pers menjadikannya sasaran pemerintah kolonial. Pada tahun 1927, ia bersama sepuluh tokoh pergerakan Kalimantan Barat lainnya dibuang ke Boven Digoel, Papua, tanpa proses peradilan. Akibat keterlibatannya dalam Sarekat Rakyat dan kegiatan jurnalistik, Haji Rais menjadi salah satu dari sebelas tokoh Kalimantan Barat yang dibuang ke Boven Digoel oleh pemerintah kolonial pada 1 April 1927 (De Locomotief, 6 April 1927)

Di tempat pembuangan, ia menghadapi kondisi alam ekstrem dan perpecahan ideologis di kalangan tokoh komunis. Ia merasa kecewa atas sikap saling menyalahkan di antara mereka (Listiana et al., 2019:66), namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman.

Komunisme baginya adalah alat perjuangan politik, bukan ideologi utama (Prabowo, wawancara, Juni 2025). Hal ini

sejalan dengan pemikiran Tan Malaka tentang pendekatan antara Islam dan komunisme sebagai strategi anti-kolonial (Hatama et al., 2022).

3. Masa Berkeluarga

Kehidupan berkeluarga Haji Rais bin Haji Abdurrahman di mulai saat kepulangannya dari Boven Digul, Papua. Dimana pada saat itu ia menikah dan memulai kehidupan berumah tangga di usia yang cukup dewasa. Setelah kembali dari pengasingan pada tahun 1932, Haji Rais menikah dengan Jaharah binti Dolek dan memiliki dua anak yaitu Latifah dan Asnah. Istrinya wafat saat anak-anak masih kecil. Ia kemudian menikah dengan Nursiah binti Busri pada tahun 1942. Namun, menjelang kemerdekaan, Haji Rais diculik oleh tentara Jepang dan tidak pernah kembali (Listiana et al., 2019:66).

Anak-anak Haji Rais kemudian diasuh oleh kerabatnya. Meskipun tidak memiliki banyak kenangan langsung, mereka mengenang ayah mereka sebagai sosok pekerja keras, bertanggung jawab, dan disegani. (keluarga Haji Rais, wawancara Mei 2025).

B. Kehidupan Masa Muda Haji Rais bin Haji Abdurrahman

Masa muda Haji Rais bin Haji Abdurrahman merupakan fase pembentukan kesadaran nasionalismenya. Saat merantau

ke Jakarta, ia menyaksikan langsung ketimpangan sosial-politik akibat kolonialisme Belanda. Ia bekerja di surat kabar *Neratja* milik Agus Salim dan menjalin hubungan dekat dengan tokoh-tokoh pers seperti Parada Harahap (*Bintang Hindia*) dan Djojopranoto (*Nyala*), dua media yang dikenal sebagai corong pemikiran kiri. Di sinilah ia mulai membentuk pandangan kritis terhadap kolonialisme, sekaligus memperkuat jati dirinya sebagai aktivis pers. Menurut Lisyawati (wawancara, 2025), Haji Rais dikenal sebagai pribadi berani, berpikiran terbuka, dan memiliki komitmen tinggi terhadap perjuangan rakyat. Karakter tersebut membawanya terlibat aktif dalam berbagai organisasi perjuangan.

1. Keterlibatan dalam Sarekat Islam (SI)

Haji Rais bergabung dengan Sarekat Islam (SI), organisasi awal abad ke-20 yang awalnya fokus pada perbaikan ekonomi umat Islam dan kemudian berkembang menjadi gerakan politik (Rachman et al., 1991:50). Di Kalimantan Barat, SI mulai berkembang pada 1914 di Ngabang dan Pontianak, menjadi tempat berhimpunnya elite lokal yang menyerap ide-ide pergerakan dari Jawa (Hasanuddin, 2014:186). Menurut Prabowo (2025) munculnya SI Merah yang berhaluan komunis juga memengaruhi cabang-cabang daerah

termasuk Kalimantan Barat, yang membuat SI di sana menjadi vakum pada awal 1920-an.

Listiana et al., (2019:58) mengatakan bahwa Haji Rais memilih mengikuti Sarekat Rakyat yang digawangi oleh Gusti Sulung Lelanang untuk menentang pemerintah Belanda secara non-cooperation, terbuka, dan berani. Visi dari Sarekat Rakyat dirasa cocok dengan gerak perjuangan Haji Rais yang menentang segala bentuk penindasan dan pengisapan kepada rakyat. Propaganda politik yang dilakukan oleh kaum komunis hanya memikat hati kaum pergerakan, termasuk Haji Rais karena sifatnya yang revolusioner, sesuai dengan jiwa muda dan idealisme kaum muda intelektual pada masa itu.

2. Bergabung dengan Sarekat Rakyat (SR)

Sarekat Rakyat (SR) muncul sebagai bentuk perlawanan baru terhadap kolonialisme, dengan pendekatan yang lebih tegas dan ideologis. Organisasi ini menjadi wadah bagi tokoh muda progresif, termasuk Haji Rais, untuk mendorong perubahan sosial secara radikal. Menurut Prabowo (2025), pengaruh ISDV dan Semaun membuat SR menjadi gerakan yang menarik bagi

kaum muda karena dianggap simbol modernitas dan anti-imperialisme.

Kendati Sarekat Rakyat (SR) memiliki kecenderungan haluan kiri, keterlibatan Haji Rais bin Haji Abdurrahman lebih didasari oleh dorongan untuk membebaskan rakyat dari belenggu kolonialisme ketimbang karena kesetiaan terhadap ideologi komunisme. Listiana et al. (2019:58) menjelaskan bahwa pilihan Haji Rais terhadap SR dipengaruhi oleh karakter perjuangannya yang progresif, lugas, dan mencerminkan semangat idealisme pemuda pada masa itu.

3. Keterlibatan dalam Partai Indonesia Raya (Parindra)

Sepulang dari pengasingan, Haji Rais bin Haji Abdurrahman kembali aktif dalam dunia pergerakan melalui Partai Indonesia Raya (Parindra), sebuah partai yang menempuh jalur perjuangan kooperatif. Ia bergabung bersama tokoh seperjuangannya, seperti Gusti Sulung Lelanang. Di Kalimantan Barat, Parindra telah berdiri sejak tahun 1935, khususnya di wilayah Pontianak dan Ngabang, serta menghimpun tokoh-tokoh dari kalangan elite maupun mantan aktivis politik. Kiprah Haji Rais dalam partai ini terlihat dari keterlibatannya sebagai salah satu delegasi Kalimantan Barat dalam Kongres Parindra III di Surabaya pada

tahun 1941, sebagaimana tercatat dalam surat kabar *Borneo Barat* (17 Juli 1941:2). Menurut Prabowo (2025), keikutsertaan tersebut menjadi bukti peran strategis Haji Rais dalam kancah politik nasional, meskipun ia bukan bagian dari pendiri partai.

4. Keanggotaan dalam Persatuan Anak Borneo (PAB)

Selain Parindra, Haji Rais juga tergabung dalam Persatuan Anak Borneo (PAB), organisasi yang awalnya didirikan oleh pemerintah kolonial untuk menghambat pengaruh nasionalisme. Namun, organisasi ini justru menjadi ruang konsolidasi para pemuda lokal. Menurut Hasanuddin (2014:196–197), Haji Rais dan Gusti Sulung Lelanang aktif dalam PAB, serta mendorong semangat persatuan dan kesadaran nasionalisme.

Haji Rais sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah *Kesedaran* yang dikelola oleh PAB. Ia hanya memimpin selama enam edisi dan memutuskan keluar karena ingin menjadi jurnalis yang merdeka, tidak terikat oleh organisasi. Setelahnya, ia lebih memilih bekerja sebagai konsultan hukum untuk membantu rakyat (Listiana et al., 2019:72).

C. Akhir Hayat Haji Rais bin Haji Abdurrahman

Setelah keluar dari organisasi Persatuan Anak Borneo (PAB), Haji Rais memilih menjadi tokoh jurnalistik independen. Ia mendirikan kantor konsultasi untuk membantu masyarakat, seperti tercantum dalam iklan *Kesedaran* No. 8, Agustus 1940, yang menyebutnya sebagai "Vertegenwoordiger v/h Administratiekantoor BAHAGIA" di Sultansweg No. 9, Pontianak. Namun, masa pendudukan Jepang mengubah segalanya. Menurut Asnaini, (2013:38), Jepang mulai berkuasa di Kalimantan Barat pada 2 Februari 1942, setelah melakukan serangan udara di beberapa kawasan padat penduduk.

Prabowo (2019) mencatat bahwa penangkapan besar-besaran dimulai pada 23 Oktober 1943, dan dilanjutkan pada 24 Mei 1944 saat Konferensi Nissinkai di Pontianak. Haji Rais termasuk yang ditangkap, dan menurut Listiana et al. (2019:53), ia sempat menyelamatkan keluarganya ke Singkawang sebelum akhirnya ditangkap dan dibunuh oleh Jepang pada tahun 1944. Tempat pemakamannya hingga kini tidak diketahui (Wawancara Keluarga, Mei 2025).

Setelah wafatnya, rumah Haji Rais diwariskan kepada adiknya, Japri. Rumah tersebut kini telah direnovasi dan diberi nama Gang Japri sebagai bentuk

penghormatan keluarga (Wawancara Keluarga, 2025).

Pengabdian Haji Rais diakui oleh negara melalui gelar Pahlawan Perintis Kemerdekaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1964 (Lembaran Negara No. 19/1964). Istrinya, Nursiah, juga menerima bantuan dari Departemen Sosial sebagai bentuk penghormatan (Wawancara, Mei 2025).

Sebagai penghargaan lokal, namanya diabadikan menjadi Jl. Haji Rais Abdurrahman di Pontianak Barat. Ia juga dikenang dalam Tugu Digulis Kalimantan Barat bersama 10 tokoh lainnya yang dibuang ke Boven Digoel. Menurut Tomi (2018), monumen ini memperingati sebelas pejuang pergerakan politik yang dianggap membahayakan kekuasaan Belanda, termasuk Haji Rais yang wafat dalam Peristiwa Mandor.

Peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman Dalam Membangun Kesadaran Nasionalisme Rakyat Kalimantan Barat Melalui Pers

A. Kolonialisme Belanda di Kalimantan Barat Pada Abad ke 20

1. Sistem Pemerintahan

Pada awal abad ke-20, sistem pemerintahan kolonial di Kalimantan Barat ditandai dengan pengakuan raja-raja lokal terhadap kekuasaan Belanda.

Struktur pemerintahan meliputi Residen, Asisten Residen, dan Controleur, sementara raja-raja hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan lokal tanpa kewenangan nyata. Undang Undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet/DW*) 1903 mengantar praktik otonomi daerah, Kebijakan tersebut memberi peran lebih besar bagi pejabat pemerintah daerah dalam kekuasaan rezim kolonial di daerah walaupun masih meliputi seputar masalah keuangan.

Implementasi DW dalam bidang ketatanegaraan bertahap dialami Borneo Barat pada 1919 [Staatsblad, 1919 No 512] dengan pemberian status Karesidenan Borneo Barat (*Residentie Westerafdeeling van Borneo*) dan sejak itu Pontianak memiliki status ibukota keresidenan. Implementasi DW bagi Pontianak meningkat pada 1938 dengan status *geweest* (setingkat status gemeente di Hindia Belanda) berdasar *Gouvernement Besluit* 30 Juni 1938 No 21 (Usman, 2016:98).

Struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Kalimantan Barat melibatkan pamong praja lokal seperti demang dan kepala adat sebagai pelaksana administrasi, namun kendali utama tetap berada di tangan pejabat Belanda. Dominasi langsung Belanda dalam sistem pemerintahan ini secara

bertahap menggerus otoritas para raja lokal, sekaligus membebani rakyat dengan tekanan pajak yang semakin berat.

2. Perkembangan Pendidikan

Pada awal abad ke-20, Kalimantan Barat masih berada dalam kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Di tengah sistem pemerintahan kolonial yang bersifat diskriminatif dan sentralistik, wilayah ini mulai mengalami perubahan sosial melalui kebijakan Politik Etis yang diterapkan pemerintah kolonial sejak tahun 1901. Salah satu pilar utama kebijakan tersebut adalah edukasi, yang meskipun bersifat terbatas, namun telah membuka akses pendidikan bagi sebagian kecil masyarakat pribumi, khususnya kalangan bangsawan dan pegawai.

Susilo & Isbandiyah (2018) juga menuturkan hal yang sama bahwa Kebijakan Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi merupakan langkah awal dalam perjuangan pemuda di Indonesia. Meskipun sebagian besar yang diperbolehkan sekolah adalah anak-anak dari para bangsawan pribumi (elit pribumi), namun kemudian para anak bangsawan itu muncul sebagai kaum intelek yang memikirkan nasib bangsanya yang tertindas.

Pendidikan hanya terbatas bagi kalangan elit. Sekolah seperti *Volksschool* diperuntukkan bagi rakyat biasa, sementara anak-anak bangsawan dan pejabat bumiputera disediakan *Hollands Indlansche School* (HIS) dan *Europese Lagere School* (ELS). Sekolah untuk etnis Tionghoa pun dibuka melalui *Hollands Chinees School* (HCS). Pendidikan Barat memang terbatas, tetapi justru melahirkan kaum intelektual yang mulai menyuarakan kesadaran nasionalisme, salah satunya melalui media pers (Susilo & Isbandiyah, 2018).

3. Perkembangan Ekonomi

Kolonialisme dan imperialisme sangat erat kaitannya dengan pembentukan sistem ekonomi yang eksploitatif, timpang, dan menindas. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, struktur ekonomi yang dibentuk oleh sistem kolonial telah membentuk ketimpangan yang dalam. Reaksi terhadap kondisi ini kemudian menjadi pemicu munculnya kesadaran nasionalisme dan gerakan perlawanan, baik dalam bentuk organisasi, pendidikan, maupun media pers. Pertumbuhan pelabuhan Pontianak memperkuat jejaring dagang lintas wilayah dan menjadi simpul strategis ekonomi Belanda di Kalimantan Barat (Prabowo, 2025).

Memasuki awal abad ke-20, Pontianak mengalami gelombang urbanisasi yang signifikan. Masyarakat dari wilayah pedalaman, terutama dari kalangan Melayu dan Tionghoa, bermigrasi ke kota untuk menjalani profesi sebagai pedagang, pegawai, maupun pelajar. Proses modernisasi ekonomi juga terlihat melalui pembentukan Pasarfonds, sebuah lembaga resmi bentukan pemerintah kolonial yang mengatur perdagangan serta menentukan harga-harga kebutuhan pokok. Keberadaan pasar dan sistem ekonomi kota ini kemudian menjadi pusat pertumbuhan kapitalisme kolonial yang secara tidak langsung membangkitkan kesadaran kritis dan semangat perlawanan di tengah rakyat.

B. Munculnya Pers di Kalimantan Barat

Pers di Kalimantan Barat muncul sebagai respons terhadap kolonialisme dan menjadi alat penting dalam menyuarakan nasionalisme. Menurut Windriani, (2022), nasionalisme adalah "keadaan pikiran" yang lahir dari pengalaman sejarah dan keinginan membentuk identitas kolektif. Hal ini dikuatkan oleh Perdana & Pratama (2022:26) yang menyatakan bahwa nasionalisme muncul sebagai reaksi terhadap sistem eksploitasi kolonial. Pers kemudian menjadi alat strategis untuk

membangkitkan kesadaran rakyat atas penindasan tersebut (Fahrudin et al., 2021:69).

1. Pengertian Pers

Daulay (2016:3) mengatakan pers mencakup surat kabar, majalah, hingga media elektronik. Syahriar (2020) menyebutkan empat fungsi utama pers: informasi, politik, ekonomi, dan hiburan. Dalam konteks perjuangan, fungsi politik menjadi yang paling relevan karena pers digunakan untuk menyuarakan hak rakyat dan mengkritik kolonialisme.

2. Pers Perjuangan

Sejak awal, pers Indonesia adalah pers perjuangan yang digunakan para tokoh nasionalis untuk menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme (Afandi et al., 2023:36). Pers berperan menyebarkan asas dan program perjuangan para pemimpin pergerakan seperti Soetomo dan Tjokroaminoto. Perkembangan pers dari masa ke masa sebagai media perjuangan tentunya banyak sekali perbedaan dalam setiap periodenya. Maka dari itu pers menjadi media terpenting sepanjang tahun untuk menyuarakan aspirasi dan advokasi masyarakat.

Menurut Daulay (2016:31) ia mengatakan bahwa dalam rentang waktu peradaban manusia, pers merupakan salah satu bentuk sarana perubahan dan

kemajuan bagi masyarakat dan negara. Hal ini terjadi karena pers berfungsi menyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.

3. Perkembangan Pers di Kalimantan Barat

Di awal abad ke-20, pers di Kalimantan Barat mulai berkembang seiring munculnya organisasi pergerakan. Surat kabar menjadi sarana menyuarakan gagasan anti-kolonial dan membentuk kesadaran nasional. Perkembangan pers terbagi dalam dua fase. Fase pertama (1920–1926) ditandai dengan radikalisme dan kritik tajam terhadap Belanda. Surat kabar seperti *Halilintar* dan *Berani* menjadi alat perlawanan, tetapi akhirnya banyak dibredel (Lisyawati & Sofian, wawancara 2025). Fase kedua (1927–1941) lebih hati-hati, dengan surat kabar seperti *Kapoea Bode*, *Borneo Barat*, dan *Kesadaran* yang mengusung haluan netral dan menghindari konfrontasi langsung.

C. Peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman Dalam Pers

1. Sebagai Pengurus Surat Kabar Halilintar (1923–1924)

Surat kabar *Halilintar*, yang terbit pertama kali pada 7 Juli 1923 di

Pontianak, merupakan media perjuangan kaum pergerakan dalam menyuarakan keadilan sosial dan melawan kolonialisme. Tokoh seperti Haji Rais bin Haji Abdurrahman terlibat sebagai anggota mingguan redaksi dengan nama pena “Abdurrachman” (*Halilintar*, 29 Desember 1923:3; *Halilintar*, 3 Mei 1924:4). Dalam tulisannya yang dimuat di rubrik “Dahoeloe dengan Sekarang” (*Halilintar*, 9 Februari 1924), Haji Rais mengkritik sistem kapitalis yang menindas rakyat kecil dan memuji prinsip-prinsip komunisme yang dianggap memperjuangkan keadilan sosial, meski tidak anti-agama. Ini menunjukkan peran *Halilintar* sebagai media berhaluan kiri namun tetap menyisipkan nilai keagamaan (*Halilintar*, Mei 1924).

Namun, terdapat versi lain yang menyebut “Abdurrachman” adalah Djeranding Abdurrahman, bukan Haji Rais (De Locomotief, 6 April 1927). Nama Djeranding baru muncul dalam *Halilintar Hindia*, edisi 19 November 1924 yang telah dikelola Sarekat Rakyat (Listiana et al., 2019:63; *Halilintar Hindia*, 1924). Dengan demikian, Haji Rais dapat dipastikan berperan dalam surat kabar *Halilintar* hingga 1924, sebelum pengelolaan berpindah kepada Sarekat Rakyat. Surat kabar ini berfungsi

sebagai media kritik terhadap kolonialisme serta alat untuk membangun kesadaran rakyat (Tomi, 2025:51).

2. Sebagai Wakil Hoofdredacteur Surat Kabar Borneo Barat (Maret–Juli 1938)

Haji Rais menjabat sebagai wakil hoofdredacteur (wakil redaktur utama) surat kabar *Borneo Barat* sejak Maret hingga Juli 1938, di bawah kepemimpinan R.R. Paath. Hal ini dikonfirmasi dalam rubrik ‘Sedikit Oetjapan’ edisi 3 Maret 1938 No. 25 Tahun ke III, di mana ia menyatakan peranannya secara langsung (Borneo Barat, 1938). Dalam rubrik tersebut, Haji Rais menekankan bahwa menjadi wartawan bukan semata karena kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai tanggung jawab sosial dan moral “*membela kepentingan umum, menyuarakan kebaikan bagi masyarakat, bangsa, dan nusa*” (Borneo Barat, 1938:3).

Ia juga menegaskan bahwa meskipun pers Kalimantan Barat tertinggal dibanding Jawa, media tetap harus digunakan untuk mencerdaskan rakyat dan mendukung kemajuan bangsa: “*Moga-moga surat kabar Borneo Barat dapat mencapai segala cita-citanya untuk kemajuan dan kepentingan daerah ini khususnya atau Indonesia umumnya.*”

Surat kabar *Borneo Barat* tergolong

media netral yang memuat berita lokal, nasional, hingga iklan, dan dikenal sebagai surat kabar nasionalis karena menyuarakan persatuan dan kesadaran kebangsaan dengan bahasa yang santun (Listiana et al., 2014:90).

3. Peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman sebagai Kepala Redaksi Majalah Kesedaran (1939)

Haji Rais bin Haji Abdurrahman menunjukkan kiprahnya dalam dunia pers melalui keterlibatannya sebagai pemimpin redaksi majalah *Kesedaran*, media resmi dari organisasi Persatuan Anak Borneo (PAB), yang terbit sejak tahun 1939. Selama tahun pertama, Haji Rais memimpin enam edisi awal majalah tersebut sebelum akhirnya memilih mundur karena ingin menjadi jurnalis merdeka yang tidak terikat organisasi (Tomi, 2025:57).

Majalah *Kesedaran* dicetak di percetakan NV. Boekhandel & Drukkerij Phin Min dan bermarkas di Sultansweg No. 9 (sekarang Jl. Imam Bonjol). Dalam edisi 2 Februari 1940, No. 2 Tahun II, ditampilkan foto Haji Rais bersama tokoh lainnya dengan keterangan “*bekas pemimpin madjallah ini*” (*Kesedaran*, 2 Februari 1940:6). Dalam pidatonya pada rapat umum PAB, 22 Desember 1939, yang berjudul *Penjiaran (Pers)*, Haji Rais menegaskan pentingnya media sebagai

alat komunikasi massa dan pendidikan publik. Ia menggunakan analogi tukang lelang untuk menggambarkan bahwa keberhasilan aktivitas ekonomi sangat bergantung pada penyiaran informasi melalui media, iklan, dan juru kabar (Kesedaran, 2 Februari 1940:11).

Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan antara pers masa lalu yang penuh semangat perjuangan dan radikal, dengan kondisi pers saat itu yang menurutnya lebih longgar dan terkooptasi. Oleh karena itu, Haji Rais merasa bahwa pers tidak lagi menjadi corong suara rakyat, sehingga ia memilih mundur (Listiana et al., 2019:71).

Pengunduran dirinya dikonfirmasi dalam rubrik “Kemoedi Kesedaran” (5 Agustus 1940), yang menyatakan bahwa Haji Rais berhenti atas keinginannya sendiri dan memilih jalan perjuangan yang lebih bebas melalui jalur jurnalistik dan bantuan hukum bagi masyarakat (Kesedaran, 5 Agustus 1940).

Meskipun tidak lagi menjadi pemimpin redaksi, ia tetap berkomitmen menyumbangkan tulisannya. Rubrik “Oetjapan terima kasih” dalam edisi yang sama menegaskan bahwa jasa Haji Rais “tetap termateri dalam sejarah P.A.B dan majalah *Kesedaran*” (Kesedaran, 5 Agustus 1940:13).

Mengkaji Dampak Peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman Dalam Membangun Kesadaran Nasionalisme Rakyat Kalimantan Barat

A. Dampak Peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman Terhadap Kesadaran Nasionalisme Rakyat di Kalimantan Barat

Peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman dalam dunia pers mendorong tumbuhnya kesadaran nasionalisme rakyat Kalimantan Barat. Salah satu dampak dari peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman dalam membangun kesadaran nasionalisme rakyat di Kalimantan Barat yaitu mulai munculnya orang-orang yang berani mengemukakan pendapatnya melalui surat kabar. Seperti dalam surat kabar *Halilintar*, ia menyuarakan penderitaan rakyat serta membuka ruang publik bagi rakyat untuk berpendapat, termasuk melalui rubrik anonim seperti “Borneo Barat Moedah-Moedahan Mendapat Selamat” yang menyoroti penindasan struktural dan Pasal 161 bis KUHP (Halilintar, 2 Februari 1924).

Ketegasannya juga tercermin dalam edisi *Halilintar* 10 Mei 1924, ketika redaksi menolak tunduk atas pelarangan dan perampasan koran oleh pejabat Ketapang karena memuat kritik terhadap Asisten Residen, Tuan Ballot. Redaksi menyatakan: “Kalau betul ini bukan seorang pemabuk... kami persilakan Tuan Ballot mengatur

pengaduan ke pengadilan kami tunggu!” (Halilintar, 10 Mei 1924). Dengan demikian, peran Haji Rais telah Menumbuhkan keberanian rakyat menyuarkan ketidakadilan, membuka ruang diskusi publik yang kritis dan menanamkan nilai nasionalisme berbasis moral dan keadilan sosial.

B. Dampak Peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman Terhadap Organisasi Pergerakan di Kalimantan Barat

1. Sarekat Rakyat (SR)

Tulisan Haji Rais dalam *Halilintar* mendorong tumbuhnya kesadaran politik yang menjadi dasar terbentuknya organisasi seperti Sarekat Rakyat. SR resmi muncul di Pontianak pada November 1924, seperti diumumkan dalam *Halilintar Hindia*: “Kini telah lahir di Pontianak Serikat Rakyat, yang bertujuan membela kepentingan kaum kita yang terhina ini” (Halilintar Hindia, 19 November 1924, No. 44 Tahun ke-II). Selain itu, ia turut menginisiasi pembentukan *Lees Internationale Debating Club* (LIDC), wadah diskusi politik yang menjadi tempat edukasi rakyat—meski akhirnya dianggap subversif oleh Belanda (Berani, 18 Juli 1925:3).

Aju (2017:34) juga menyatakan bahwa *Debating Club* yang selalu

menyuguhkan materi debat politik digelar setiap hari Minggu, dan semain menarik perhatian banyak pihak dari berbagai suku, agama ras dan antar golongan Berkat Surat Kabar Halilintar, peserta debat politik terus bertambah, karena materinya mebicarakan seputar berbagai bentuk penindasan masyarakat di Kalimantan Barat yang hanya bisa dihilangkan jika Indonesia merdeka.

2. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Setelah bebas dari pengasingan di Boven Digoel, Haji Rais kembali aktif di dunia politik melalui Parindra. Ia terlibat dalam kolaborasi Parindra dan PAB untuk mengembangkan pendidikan dan ekonomi rakyat. Parindra membentuk organisasi pemuda *Surya Wirawan* yang sangat aktif dalam pengkaderan dan pendidikan politik (Hasanuddin, 2014:195; Prabowo, 2020).

3. Persatuan Anak Borneo (PAB)

Pengaruh Haji Rais juga tampak dalam PAB, organisasi yang fokus pada pendidikan dan kebudayaan. PAB mendorong pendirian sekolah-sekolah untuk putra-putri Borneo seperti *Volkschool*, *Schakelschool*, dan *INS Pontianak* (Achmad et al., 1981:54; Listiana et al., 2019:100). Dalam bidang kebudayaan, Haji Rais turut menyokong pembentukan *Badan Kebudayaan P.A.B.* yang memfasilitasi pertunjukan *toneel*

dan kegiatan seni lainnya (Kesedaran, 2 Februari 1940). Kegiatan ini menjadi media untuk memperkuat identitas kebangsaan dan membangkitkan semangat perlawanan melalui jalur kebudayaan (Mari et al., 2023).

C. Dampak Peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman di Surat Kabar Terhadap Ekonomi Masyarakat

Peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman dalam surat kabar seperti *Halilintar*, *Borneo Barat*, dan majalah *Kesedaran* tidak hanya terbatas pada penyebaran ide pergerakan, tetapi juga memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Surat kabar yang ia kelola menjadi media promosi bagi pelaku usaha lokal, khususnya bumiputra Kalimantan Barat, melalui rubrik iklan.

Surat kabar kala itu beroperasi seperti usaha mandiri yang bergantung pada langganan dan iklan. Misalnya, *Halilintar* mencantumkan tarif iklan dan langganan secara terbuka di halaman depan—menunjukkan transparansi dan keterbukaan pada partisipasi publik dalam ekonomi media (Halilintar, 7 Juli 1923). Namun, keterbatasan pendanaan membuat *Halilintar* hanya mampu terbit hingga November 1924 (Prabowo, wawancara Juni 2025).

Beragam jenis iklan dimuat, mulai dari jasa pengobatan seperti praktik “Advertentie Mas Agoesdjam” (Halilintar, 7 Juli 1923), toko perabotan “Toko Fuku & Co”

(Halilintar, 7 Juli 1923), hingga iklan gaya hidup seperti “Kernal-Sport” yang menjual perlengkapan tenis dan badminton (Borneo Barat, 5 Juli 1938), dan “Toengah-Restaurant” yang menyediakan makanan Eropa dan Tionghoa (Borneo Barat, 21 Juli 1938).

Keterlibatan Haji Rais dalam pengelolaan media ini menunjukkan bahwa surat kabar juga berperan sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal. Media menjadi wadah membangun semangat wirausaha dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus membuka interaksi budaya melalui konsumsi produk modern dan multietnis.

Dengan demikian, surat kabar bukan hanya alat perjuangan politik, tetapi juga wahana pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberadaan rubrik iklan menjadi penanda bahwa rakyat mulai terlibat dalam dinamika ekonomi modern, yang mencakup kebutuhan dasar hingga gaya hidup.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan mengungkap peran Haji Rais bin Haji Abdurrahman dalam membangun Kesadaran nasionalisme rakyat melalui pers tahun 1923–1942. Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, diperoleh tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Haji Rais bin Haji Abdurrahman adalah tokoh pergerakan asal Pontianak yang lahir

pada 1904. Ia tumbuh dalam lingkungan religius, mengenyam pendidikan Belanda, dan aktif merantau ke Jawa untuk menimba pengalaman, terutama dalam bidang pers. Keterlibatannya dalam Sarekat Islam, Sarekat Rakyat, dan Parindra membentuk kesadaran politiknya, yang semakin kuat setelah diasingkan ke Boven Digoel.

2. Haji Rais bin Haji Abdurrahman aktif sebagai penulis dan redaktur di surat kabar *Halilintar*, *Borneo Barat*, dan majalah *Kesedaran*. Lewat media ini, ia menyuarakan kritik terhadap kolonialisme, mendorong persatuan, serta membentuk opini rakyat tentang pentingnya kemerdekaan. Pers dimanfaatkan sebagai alat perjuangan non-fisik yang menyebarkan ide kebangsaan secara luas.
3. Media yang dikelola Haji Rais turut mendorong terbentuknya organisasi seperti Sarekat Rakyat, Parindra, dan PAB, serta membangkitkan kesadaran politik dan sosial masyarakat. Selain itu, surat kabar juga menjadi ruang promosi ekonomi rakyat melalui iklan, yang mendorong tumbuhnya partisipasi dalam pendidikan, perdagangan, dan kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Uliyanda, D., Safarini, F., Laili Ramadhini, I., Rahmadia, I., Aditya Dewantara, J., & Putri, S. (2023). NASIONALISME DI INDONESIA Nationalism in Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 3(1).
- Aju. (2017). *Kalimantan Barat: Lintasan Sejarah dan Pembangunan dari Era Kolonial Belanda Sampai Tahun 2013*. Pontianak: Derwati Press.
- Daliman, A. (2018). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fahrudin, A., Bustami, M. R., Andriyani, L., & Albert, W. K. G. (2021). Nasionalisme Ragam dan Rasa. In *Sustainability (Switzerland)*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hasanuddin. (2014). *Pontianak Masa Kolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hatama, D. A. G. P., Anwar, & Batina, L. (2022). Perkembangan Komunisme Di Indonesia Tahun 1914-1927. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO (JPPS-UHO)*, 7(1), 57–72.
- Herlina, N. (2020). Metode sejarah. In *Satya Historika* (Vol. 110, Issue 9). Satya Historika.
[http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages from Metode Sejarah Revisi Akhir 2020.pdf](http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages%20from%20Metode%20Sejarah%20Revisi%20Akhir%202020.pdf)
- Listiana, D., Nurcahyani, L., & Rahmayani, A. (2019). *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan*. Bandung: Media Jaya Abadi.
- Perdana, Y., & Pratama, R. A. (2022). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Prabowo, M. R. (2019). Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 di Kalimantan Barat: Suatu Pembunuhan Massal di Masa Pendudukan Jepang. *Bihari: Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 2(1), 26–37.
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/868/578>
- Prabowo, M. R. (2025). Eksistensi sarekat rakyat Pontianak , 1924-1926. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*,

15(1),1924–1926.

<https://doi.org/10.25273/ajsp.v15i1.19580>

Susilo, A. &, & Isbandiyah. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Historia*, 6(2), 403–416.

Syahriar, I. (2020). Fungsi pers sebagai penyebaran informasi dalam penegakan hukum di Indonesia. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2), 19–35.

Tomii. (2018). *Napak Tilas Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat*. Sanggau: Tom’S Book Publishing.

Tomii. (2025). *Haji Rais Abdoerracman*. Pontianak: Tom’S Book Publishing.

Usman, S. (2016). *Kota Pontianak Doeloe-Kini-Mendatang*. Pontianak: PT. Mitra Bangun Kota.

Windriani, D. (2022). Situating The Notion of Nationalism in Whitman ’ s “ Song of Myself ” and Roy ’ s The God of Small Thing. *Ksatria: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra*, 4(1), 75–84.

Sumber koran:

Halilintar Nomor 3, 7 Juli 1923

Halilintar Nomor 3, 29 Desember 1923

Halilintar Nomor 5, 2 Februari 1924

Halilintar Nomor 6, 9 Februari 1924

Halilintar Nomor 4, 3 Mei 1924

Halilintar Nomor 17, 10 Mei 1924

Halilintar Hindia Nomor 44, 19 November 1924

Berani Nomor 82, 18 Juli 1925

De Locomotief Nomor 78, 6 April 1927

Borneo Barat Nomor 25, 3 Maret 1938

Borneo Barat Nomor 75, 5 Juli 1938

Borneo Barat Nomor 25, 21 Juli 1938

Borneo Barat 17 Juli 1941

Kesedaran Nomor 2, 2 Februari 1940

Kesedaran Nomor 8, 5 Agustus 1940